

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Semester Kedua Tahun Anggaran 2018 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2018. Berdasarkan laporan ini realisasi Pendapatan TA 2018 adalah nihil, sedangkan realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 9.026.813.512,00 atau mencapai 96,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 9.371.000.000,00.
2. Laporan Operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas. Dari Laporan Operasional tersebut diinformasikan bahwa nilai Pendapatan-LO adalah sebesar Rp. 0,00 serta nilai Beban-LO adalah sebesar Rp. 9.062.745.561,00
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan ini, ekuitas akhir Biro Protokol dan Komunikasi Publik TA 2018 adalah Rp 626.775.594,00.
4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Biro Protokol dan Komunikasi Publik per 31 Desember 2018. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset adalah Rp 626.775.594,00, kewajiban Rp 0,00, dan ekuitas Rp (626.775.594,00).
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang struktur organisasi, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan

Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2018 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Palangka Raya, 31 Desember 2018

KEPALA BIRO PROTOKOL
DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HM. ISTANI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630704 198803 1 015

Biro Protokol dan Komunikasi Publik

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung jawab	4
Ringkasan	5
Laporan Realisasi Anggaran	5
Laporan Operasional	6
Laporan Perubahan Ekuitas	7
Neraca	8
Catatan atas Laporan Keuangan	8
Bab I Pendahuluan	12
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	12
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan	13
1.3 Sistematika penulisan Catatan atas laporan keuangan	14
Bab II Biro Protokol dan Komunikasi Publik, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD	16
2.1 Biro Protokol dan Komunikasi Publik	16
2.2 Kebijakan keuangan	20
2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD	22
Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan	23
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan	23
Bab IV Kebijakan Akuntansi	24
4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah	24
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	24
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	25
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP	35
Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan	36
5.1 Rincian dari penjelasan setiap pos-pos laporan keuangan	36
5.1.1 Pendapatan – LRA	36
5.1.2 Belanja	36
5.1.3 Pendapatan – LO	40
5.1.4 Beban	41
5.1.3 Aset	46
5.1.4 Kewajiban	50
5.1.5 Ekuitas	51
Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan	52
Bab VII Penutup	53
Daftar Lampiran	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Operasional (LO); (c) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 31 Desember 2018

KEPALA BIRO PROTOKOL
DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HM. ISTANI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630704 198803 1 015

RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Semester Pertama Tahun Anggaran 2017 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode (1 Januari s/d 31 Desember 2018). Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2018 adalah nihil. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 9.026.813.512,00 atau mencapai 96,33 % dari anggarannya sebesar Rp 9.371.000.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2018 dan Tahun 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2018		Tahun 2017	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja	9.371.000.000,00	9.026.813.512,00	8.320.300.000,00	8.026.173.445,00

Uraian	Tahun 2018		Tahun 2017	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00



Uraian	Tahun 2018		Tahun 2017	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja	9.371.000.000,00	9.026.813.512,00	8.320.300.000,00	8.026.173.445,00



2. Laporan Operasional (LO)

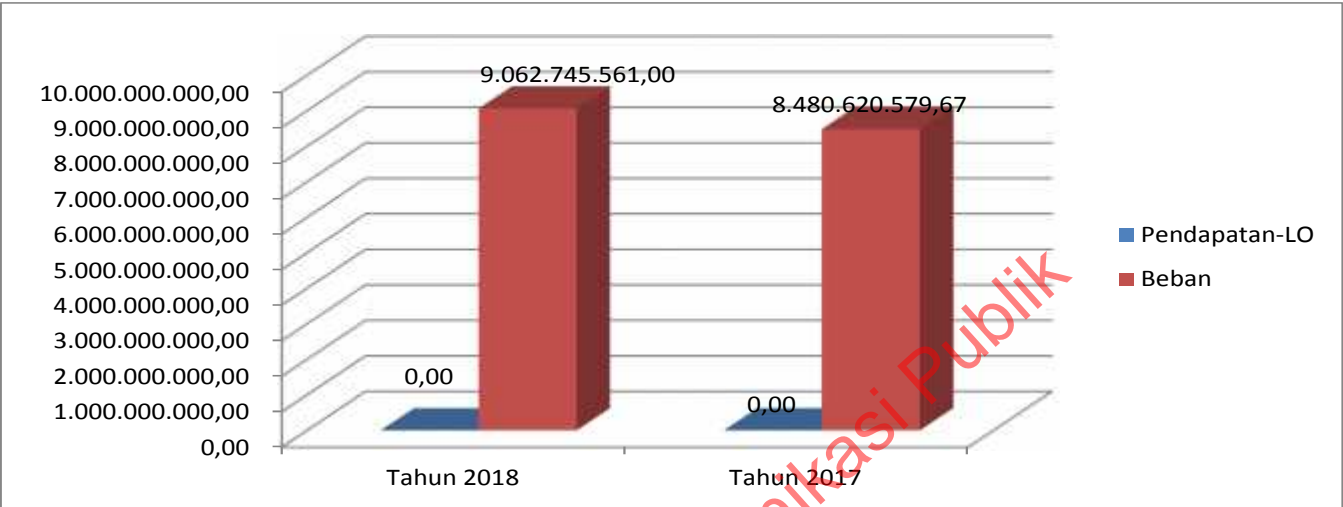
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional (LO) terdiri dari pendapatan – LO, beban, transfer, dan pos – pos luar biasa.

Pendapatan - LO pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 0,00 dan beban sebesar Rp 9.062.745.561,00. Pendapatan – LO TA 2017 sebesar Rp 0,00 dan beban Rp 8.480.620.579,67. Ringkasan Laporan Operasional (LO) sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan-LO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Beban	9.062.745.561,00	8.480.620.579,67	582.124.981,33	6,42
Surplus/Defisit-LO	(9.062.745.561,00)	(8.480.620.579,67)	(582.124.981,33)	6,42

	Tahun 2018	Tahun 2017
Pendapatan-LO	0,00	0,00
Beban	9.062.745.561,00	8.480.620.579,67



3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan disandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal sebesar Rp 701.688.178,00 berasal dari ekuitas akhir 2017 sebesar Rp 701.688.178,00 ditambah kewajiban untuk dikonsolidasikan (surplus/defisit LRA) 2018 sebesar (Rp 9.062.745.561,00) ditambah Koreksi ekuitas lainnya tahun 2018 sebesar Rp 38.980.535 ditambah Kewajiban Untuk di konsolidasikan Sebesar Rp. 9.026.813.512,00 sehingga ekuitas akhir 2018 sebesar Rp 626.775.594,00.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
EKUITAS AWAL	701.688.178,00	1.168.424.645,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9.062.745.561,00)	(8.480.620.579,67)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
- Koreksi Nilai Persediaan	-	-
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
- Koreksi Ekuitas Lainnya	(38.980.535,00)	(12.289.332,33)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	9.026.813.512,00	8.026.173.445,00
EKUITAS AKHIR	626.775.594,00	701.688.178,00

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah aset per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 3.202.664.920,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 0,00, aset tetap sebesar Rp. 3.202.664.920,00, dan aset lainnya sebesar Rp. 0,00. Sedangkan kewajiban sebesar Rp. 0,00 dan ekuitas sebesar Rp. 626.775.494,00. Ringkasan neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan / (Penurunan)
Aset			
- Aset Lancar	0,00	0,00	0,00
- Aset Tetap	3.202.664.920,00	3.187.941.171,00	14.723.749,00
- Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(2.575.889.326,00)	(2.486.252.993,00)	(89.636.333,00)
Kewajiban	0,00	0,00	0,00

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		REALISASI 2017 (Rp)
		ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN - LRA					
4. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4. 1. 2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4. 1. 2. 15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5	BELANJA					
5. 1.	BELANJA OPERASI	9.095.477.100,00	8.767.388.512,00	328.088.588,00	96,39	8.026.173.445,00
5. 1. 1.	BELANJA PEGAWAI	545.328.000,00	515.378.000,00	29.950.000,00	94,51	482.306.000,00
5. 1. 1. 01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5. 1. 1. 02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5. 1. 1. 03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5. 1. 1. 08.	Belanja Honorarium PNS	177.000.000,00	158.100.000,00	18.900.000,00	89,32	147.350.000,00
5. 1. 1. 10.	Belanja Honorarium Non PNS	368.328.000,00	357.278.000,00	11.050.000,00	97,00	334.956.000,00
5. 1. 2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.550.149.100,00	8.252.010.512,00	298.138.588,00	96,51	7.543.867.445,00
5. 1. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai Habis	640.761.650,00	619.214.800,00	21.546.850,00	96,64	233.402.850,00
5. 1. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	81.461.650,00	76.013.300,00	5.448.350,00	93,31	48.975.350,00
5. 1. 2. 01. 04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	5.760.000,00	240.000,00	96,00	5.775.000,00
5. 1. 2. 01. 09.	Belanja Dokumentasi	28.000.000,00	27.990.250,00	9.750,00	99,97	30.000.000,00
5. 1. 2. 01. 13.	Belanja Balihoo	525.300.000,00	509.451.250,00	15.848.750,00	96,98	148.652.500,00
5. 1. 2. 03.	Belanja Jasa Kantor	5.242.039.600,00	5.073.367.468,00	168.672.132,00	96,78	5.096.543.515,00
5. 1. 2. 03. 05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	302.945.600,00	292.107.600,00	10.838.000,00	96,42	623.715.000,00
5. 1. 2. 03. 06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	20.000.000,00	16.165.840,00	3.834.160,00	80,83	17.965.840,00
5. 1. 2. 03. 07.	Belanja Paket/Pengiriman	31.344.000,00	8.100.000,00	23.244.000,00	25,84	8.100.000,00
5. 1. 2. 03. 13.	Belanja Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	14.890.000,00	110.000,00	99,27	14.975.000,00
5. 1. 2. 03. 15.	Belanja Jasa Iklan	270.000.000,00	261.800.000,00	8.200.000,00	96,96	36.000.000,00
5. 1. 2. 03. 18.	Belanja Jasa Penyiaran Melalui Media Massa	505.000.000,00	504.575.000,00	425.000,00	99,92	405.587.675,00
5. 1. 2. 12. 20.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.097.750.000,00	3.975.729.028,00	122.020.972,00	97,02	3.990.200.000,00
5. 1. 2. 06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	632.762.240,00	573.738.050,00	59.024.190,00	90,67	256.525.000,00
5. 1. 2. 06. 01.	Belanja Cetak	597.962.240,00	539.689.000,00	58.273.240,00	90,25	222.125.000,00
5. 1. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	34.000.000,00	33.249.050,00	750.950,00	97,79	34.400.000,00
5. 1. 2. 06. 03.	Belanja Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	0,00
5. 1. 2. 08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5. 1. 2. 08. 01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5. 1. 2. 11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.112.550,00	31.500.000,00	612.550,00	98,09	12.000.000,00
5. 1. 2. 11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.112.550,00	31.500.000,00	612.550,00	98,09	12.000.000,00
5. 1. 2. 14.	Belanja Pakai Khusus dan Hari-hari Tertentu	58.250.000,00	56.000.000,00	2.250.000,00	96,14	15.400.000,00
5. 1. 2. 14.03.	Belanja Pakai Batik Tradisional	58.250.000,00	56.000.000,00	2.250.000,00	96,14	15.400.000,00
5. 1. 2. 15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.944.223.060,00	1.898.190.194,00	46.032.866,00	187,98	1.929.996.080,00
5. 1. 2. 15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.604.223.060,00	1.597.648.203,00	6.574.857,00	99,59	1.557.869.296,00
5. 1. 2. 15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	340.000.000,00	300.541.991,00	39.458.009,00	88,39	372.126.784,00
5. 1. 2. 23.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5. 1. 2. 23.03.	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5. 2.	BELANJA MODAL	275.522.900,00	259.425.000,00	16.097.900,00	94,16	0,00
5. 2. 1.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 2. 1. 11.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 2. 2.	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	275.522.900,00	259.425.000,00	16.097.900,00	94,16	0,00
5. 2. 2. 04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 2. 2. 05.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 2. 2. 14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5. 2. 2. 15.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	51.887.450,00	49.500.000,00	2.387.450,00	95,40	0,00
5. 2. 2. 16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	113.113.750,00	105.125.000,00	7.988.750,00	92,94	0,00
5. 2. 2. 17.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 2. 2. 18.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	83.634.250,00	79.800.000,00	3.834.250,00	95,42	0,00
5. 2. 2. 19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	26.887.450,00	25.000.000,00	1.887.450,00	0,00	0,00
5. 2. 2. 35.	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5. 2. 3.	Belanja Gedung Dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5. 2. 3. 01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5. 2. 4.	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 2. 4. 21.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 2. 5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5. 2. 5. 01.	Belanja Modal Pengadaan Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 2. 5. 04.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(9.371.000.000,00)	(9.026.813.512,00)	(344.186.488,00)	96,33	(8.026.173.445,00)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	(9.371.000.000,00)	(9.026.813.512,00)	(344.186.488,00)	96,33	(8.026.173.445,00)

LAPORAN OPERASIONAL (LO)



BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

NO.URUT	URAIAN	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp	KENAIKAN/PENURUNAN Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
8.	PENDAPATAN - LO				
8. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	-	-	-	#DIV/0!
8. 1. 2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	-	-	-	#DIV/0!
9.	BEBAN				
9. 1.	BEBAN OPERASI	9.062.745.561,00	8.480.620.579,67	582.124.981,33	6,42
9. 1. 1.	Beban Pegawai - LO	515.378.000,00	482.306.000,00	33.072.000,00	6,42
9. 1. 2.	Beban Barang dan Jasa	8.253.010.512,00	7.543.867.445,00	709.143.067,00	8,59
9. 1. 3.	Beban Bunga	-	-	-	-
9. 1. 4.	Beban Subsidi	-	-	-	-
9. 1. 5.	Beban Hibah	-	-	-	-
9. 1. 6.	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
9. 1. 7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	294.357.049,00	454.447.134,67	(160.090.085,67)	(54,39)
9. 1. 8.	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
9. 1. 9.	Beban Lain - Lain	-	-	-	-
9. 2.	BEBAN TRANSFER	-	-	-	-
9. 2. 1.	beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-
9. 2. 2.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
9. 2. 3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	-	-	-	-
9. 2. 4.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-
9. 2. 5.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
9. 2. 6.	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
9. 2. 7.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	-	-	-	-
9. 3.	DEFISIT NON OPERASIONAL	-	-	-	-
9. 3. 1.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-
9. 3. 2.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
9. 3. 3.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	-
9. 4.	BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	-
9. 4. 1.	Beban Luar Biasa	-	-	-	-
	JUMLAH BEBAN	9.062.745.561,00	8.480.620.579,67	582.124.981,33	6,42
	SURPLUS/DEFISIT - LO	(9.062.745.561,00)	(8.480.620.579,67)	(582.124.981,33)	6,42

NERACA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
N E R A C A
BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK SEKRETARIAT DAERAH
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kas di Bendahara FKPT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kas yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Piutang Pendapatan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Persediaan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Jangka Panjang Non Permanen				
Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Investasi Jangka Panjang Permanen				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
ASET TETAP				
Tanah	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Peralatan dan Mesin	3.202.664.920,00	3.187.941.171,00	14.723.749,00	0,46%
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Akumulasi Penyusutan	(2.575.889.326,00)	(2.486.252.993,00)	-89.636.333,00	3,61%
JUMLAH ASET TETAP	626.775.594,00	701.688.178,00	-74.912.584,00	-10,68%
DANA CADANGAN				
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	-
ASET LAINNYA				
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Tagihan TGR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
JUMLAH ASET	626.775.594,00	701.688.178,00	(74.912.584,00)	(10,68)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Utang Beban	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	-
EKUITAS				
Ekuitas				
Jumlah	626.775.594,00	701.688.178,00	(74.912.584,00)	(10,68)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	626.775.594,00	701.688.178,00	(74.912.584,00)	(10,68)

BAB I

PENDAHULUAN

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Informasi yang disajikan dalam keempat laporan tersebut harus secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam Catatan atas laporan keuangan.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Biro Protokol dan Komunikasi selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Biro Protokol dan Komunikasi Publik dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan dalam kegiatan Biro Protokol dan Komunikasi serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Biro Protokol dan Komunikasi mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi Biro Protokol dan Komunikasi apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi Tahun Anggaran 2018 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan terakhir atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 Desember 2017;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran

2018 tanggal 29 Desember 2017;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Oktober 2018;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Oktober 2018;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Biro Protokol dan Komunikasi, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN REALISASI APBD

- 2.1. Biro Protokol dan Komunikasi
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Realisasi APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan - LRA
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 5.1.2 Belanja
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal
 - 5.1.3 Pendapatan – LO
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 5.1.4 Beban
 - a. Beban Pegawai
 - b. Beban Barang dan Jasa
 - 5.1.5 Aset
 - a. Aset Lancar

- b. Aset Tetap
- c. Aset Lain-lain

5.1.6 Kewajiban

- a. Kewajiban Jangka Pendek
- b. Kewajiban Jangka Panjang

5.1.7 Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

Biro Protokol dan Komunikasi Publik

BAB II

BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN REALISASI APBD BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK

2.1 BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK

A. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85), Biro Protokol dan Komunikasi Publik merupakan salah satu unsur staf yang berada di bawah Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dan dipimpin oleh seorang Kepala Biro dengan Eselon II.b.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Protokol dan Komunikasi Publik mempunyai tugas tugas membina, mengkoordinasikan dan mengembangkan keprotokolan, penatausahaan administrasi serta komunikasi publik guna pemantapan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Biro Protokol dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain di bidang keprotokolan;
- b. penyiapan dan pelaksanaan serta pengaturan agenda dan kegiatan pimpinan;
- c. pelaksanaan acara penerimaan kunjungan tamu VIP, VVIP dan/atau tamu pemerintah daerah lainnya serta tokoh masyarakat tertentu yang memiliki tata kehormatan dan kedudukan protokoler;
- d. pelaksanaan pelayanan keprotokolan kepada instansi pemerintah/non pemerintah yang membutuhkan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Biro.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Pasal 144 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Protokol dan Komunikasi Publik mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Biro
2. Kepala Bagian Protokol, membawahi:
 - a) Kepala Sub Bagian Undangan;
 - b) Kepala Sub Bagian Pelayanan Tamu; dan
 - c) Kepala Sub Bagian Acara.
3. Kepala Bagian Penatalaksanaan Upacara dan Kerjasama Media, membawahi:
 - a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b) Kepala Sub Bagian Upacara; dan
 - c) Kepala Sub Bagian Kerjasama Media.
4. Kepala Bagian Kepala Bagian Penyaringan Informasi dan Publikasi membawahi:
 - a) Kepala Sub Bagian Informasi Pemerintahan dan Umum;
 - b) Kepala Sub Bagian Informasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c) Kepala Sub Bagian Media dan Dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Protokol dan Komunikasi Publik didukung personil PNS sebanyak 48 orang yang terdiri dari 26 orang laki – laki dan 22 orang perempuan serta 12 Orang Tenaga Kontrak. Berdasarkan golongan/pangkat, pegawai Biro Protokol dan Komunikasi Publik dapat dikelompokkan sebagai berikut:

TABEL 2.1.
REKAPITULASI PNS BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PER 31 DESEMBER 2018
BERDASARKAN GOLONGAN/PANGKAT

Nomor	Golongan/Pangkat	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV/c	0
2.	Golongan IV/b	2
3.	Golongan IV/a	1
4.	Golongan III/d	4
5.	Golongan III/c	9
6.	Golongan III/b	14
7.	Golongan III/a	6
8.	Golongan II/d	4
9.	Golongan II/c	2
10.	Golongan II/b	5
11.	Golongan II/a	1
12.	Golongan I/d	0
13.	Golongan I/c	0
14.	Golongan I/b	0
15.	Golongan I/a	0
Total		48

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan formal, pegawai Biro Protokol dan Komunikasi Publik dapat dikelompokkan sebagai berikut:

TABEL 2.2.
REKAPITULASI PNS BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PER 31 DESEMBER 2018
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL

Nomor	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S3	
2.	S2	5
3.	S1	24
4.	D4	4
5.	D3	3
6.	D2	0
7.	D1	0
8.	SMA/Sederajat	10
9.	SMP/Sederajat	1
10.	SD	1
Total		48

D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Lingkungan strategis yang berpengaruh dibidang tugas Biro Protokol dan Komunikasi Publik antara lain yaitu:

1. Adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan ketegasan tentang tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program/ kegiatan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Jumlah sumber daya manusia yang cukup besar.
3. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai sehingga mendukung penyelesaian pelaksanaan tugas.
4. Dinamika Pembangunan di Kalimantan Tengah meningkatkan peran dan posisi tawar Kalimantan Tengah khususnya Kepala Daerah sehingga pelayanan terhadap tamu-tamu daerah dituntut untuk lebih baik.

E. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi Biro Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya insan kehumasan dan keprotokolan yang handal, professional, terbuka, tanggap, dan bertanggungjawab, dalam mewujudkan Pemerintah yang bersih, dan berwibawa.”

2. MISI

Untuk pelaksanaan lebih lanjut dari Visi yang ada tersebut, Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk menetapkan Misi-nya sebagai berikut:

1. Membina hubungan yang sinergis dan harmonis dengan lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Prov. Kalimantan Tengah.
2. Mengembangkan citra Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui pelayanan standar, tanggap, terbuka, manusiawi dan bertanggung jawab mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik.
3. Mengkoordinasikan penyampaian informasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjamin validitas dan atau akurasi informasi kepada publik.
4. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparat kehumasan dan keprotokolan sesuai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi dan informatika.
5. Menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang kondusif melalui produk-produk kehumasan yang humanis.

F. TUJUAN RENSTRA DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi yaitu :

Tujuan :

" Terciptanya komunikasi dan pengembangan kehumasan dalam rangka pelayanan publik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih, professional dan responsif."

Sasaran :

- a. Meningkatnya arus informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik.
- b. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan daerah, sehingga diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
- c. Meningkatnya kecepatan peliputan pemberitaan kebijakan daerah kepada publik.

- d. Terbina dan berkembangnya media massa, sehingga diharapkan benar-benar mampu memberikan penerangan serta dapat pula menyalurkan aspirasi masyarakat dalam menuju pers yang sehat, bebas, bertanggungjawab dan dapat berperan sebagai sarana social kontrol.
- e. Terbentuknya citra pemerintahan yang baik (Good Governance), melalui penyampaian informasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya penegakan disiplin dan pemberantasan KKN di lingkungan aparatur.
- f. Terselenggaranya dokumentasi kegiatan-kegiatan pokok Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- g. Meningkatnya saran dan prasarana penunjang operasional Kehumasan.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dasar hukum kebijakan anggaran Pemerintah Daerah adalah Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2017 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyusunan APBD sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas menyatakan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan SKPD. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1) Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal dua istilah pendapatan, yaitu Pendapatan-LRA dan Pendapatan LO. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga

kelompok pendapatan daerah, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah

b. Pendapatan Transfer

1. Bagi Hasil DAU/DAK/Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya
3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
4. Bantuan Keuangan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Pendapatan Hibah
2. Dana Darurat
3. Pendapatan Lainnya

2) Belanja Daerah

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran menyebut belanja sedangkan Laporan Operasional menyebut dengan beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Klasifikasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Bunga
4. Belanja Subsidi
5. Belanja Hibah
6. Bantuan Sosial

b. Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya
 6. Belanja Aset Lainnya
- c. Belanja Tak Terduga
- 3) Transfer
- Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.
- 4) Pembiayaan
- Ada dua jenis pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

2.3 REALISASI APBD BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Anggaran Pendapatan Biro Protokol dan Komunikasi Publik tahun 2018 sebesar Rp0,00 dan Belanja Biro Protokol dan Komunikasi Publik tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp9.371.000.000,00 yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp9.095.477.100,00 dan belanja modal sebesar Rp 275.522.900,00.

Realisasi pendapatan Biro Protokol dan Komunikasi Publik tahun 2017 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp9.026.813.512,00 yang terdiri atas realisasi belanja operasi sebesar Rp8.767.388.512,00 dan belanja modal sebesar Rp259.425.000,00.

BAB III

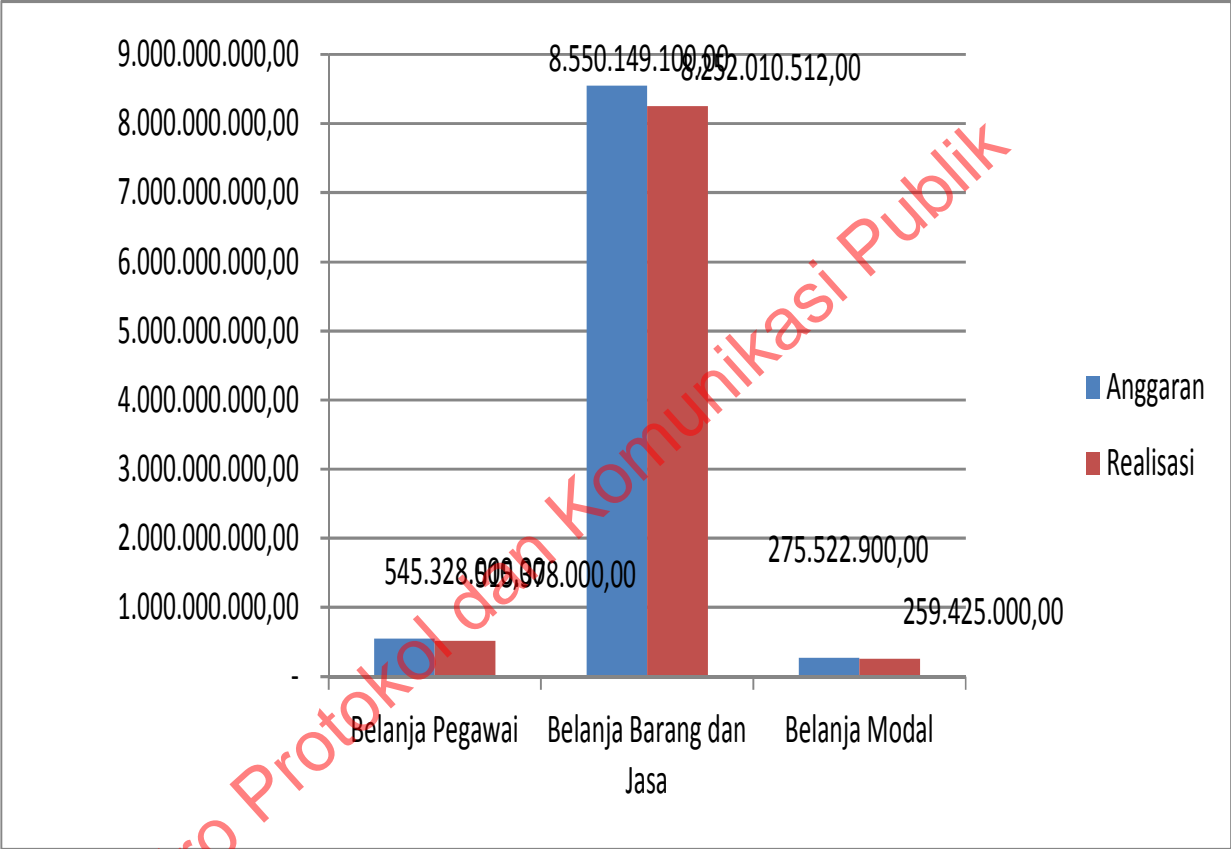
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pada bagian ini akan disajikan analisa capaian kinerja keuangan yang digambarkan dalam ringkasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Biro Protokol dan Komunikasi Publik secara keseluruhan sebagai akuntabilitas keuangan terhadap capaian indikator dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

Dari gambaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Biro Protokol dan Komunikasi Publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

III.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

(dalam rupiah)



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah.

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Entitas pelaporan keuangan adalah Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

IV.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi disusun berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

1. Basis akuntansi (*accounting basis*);

- Basis akuntansi** yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu transaksi dan kejadian diakui atas akrual.
- Transaksi penerimaan kas** atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.
- Basis Kas untuk Laporan Perhitungan APBD** (Laporan Realisasi Anggaran) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah. Entitas Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba/rugi. Penentuan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan realisasi pembiayaan dengan seluruh belanja yang telah dibayar. Sementara itu, pendapatan dan beban selain kas seperti bantuan, hibah dan sumbangan dalam bentuk barang dan jasa hanya disajikan sebagai informasi tambahan pada Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran).
- Basis Akrual Untuk Neraca** berarti bahwa aktiva, utang, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Prinsip nilai perolehan (*historical cost principle*);

- Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi utang di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.

- b. Nilai perolehan lebih handal dibandingkan penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.
- 3. Prinsip realisasi (*realization principle*);**
 - a. Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
 - b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.
- 4. Prinsip substansi mengungguli formalitas (*substance over form principle*);**

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.
- 5. Prinsip periodisitas (*periodicity principle*);**
 - a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
 - b. Periode pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.
- 6. Prinsip konsistensi (*consistency principle*);**
 - a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
 - b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
- 7. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*);**

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas laporan keuangan.
- 8. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*).**
 - a. Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas.
 - b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan utang tidak dinyatakan terlalu rendah.

IV.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Informasi Kebijakan Akun Neraca Daerah yang penting disajikan adalah :

1. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.

2. Pos-Pos Neraca

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca. Akun neraca secara garis besar terdiri atas:

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas

A. ASET

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah mengatur perlakuan akuntansi aset. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aktiva tetap pada neraca dilakukan dengan menjumlahkan semua belanja modal baik yang berasal dari belanja modal aparatur maupun publik.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lain-lain.

1) **ASET LANCAR**

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri atas :

1.1. **Kas di Kas Daerah**

1.1.1. Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.1.2. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

1.1.3. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

1.2. **Kas di Bendahara Pengeluaran**

Adalah dana yang masih tersisa dalam tahun anggaran berjalan dan belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tersebut.

1.2.1 Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat pada tahun berikutnya berdasarkan *stock opname*.

1.2.2 Kas di Bendahara Pengeluaran dinilai dalam neraca berdasarkan jumlah hasil *stock opname*.

2) **PIUTANG**

2.1 Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

2.2 Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.

2.3 Piutang yang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

- 2.4 Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- 2.5 Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dicatat atas laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain :
 - Klarifikasi piutang menurut umur
 - Klarifikasi piutang menurut debitur

3) PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS / MATERIAL

- 3.1 Persediaan Barang Pakai Habis / Material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- 3.2 Persediaan Barang Pakai Habis / Material terdiri atas perlengkapan alat tulis kantor, perlengkapan benda pos, perlengkapan alat kebersihan, Perlengkapan pegawai, perlengkapan bahan laboratorium, perlengkapan ban, aki, dan suku cadang kendaraan / alat-alat berat, perlengkapan perkakas kerja, dsb.
- 3.3 Persediaan Barang Pakai Habis / Material diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
- 3.4 Persediaan Barang Pakai Habis / Material diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai.
- 3.5 Persediaan Barang Pakai Habis / Material dinilai berdasarkan :
 - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.
 - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualan jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
- 3.6 Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Persediaan Barang Pakai Habis / Material dicatat atas laporan keuangan antara lain rincian/klarifikasi barang dan jumlah masing-masing klarifikasi.

4) INVESTASI JANGKA PANJANG

- 4.1 Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- 4.2 Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- 4.3 Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- 4.4 Penghasilan dari investasi saham diakui apabila Pemerintah Daerah menerima deviden dan/atau bunga dari perusahaan yang diinvestasikan (*investee*) pada periode berjalan dan dicatat sebagai pendapatan.
- 4.5 Harga perolehan investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Saldo pada tanggal neraca harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal tersebut.

- 4.6 Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal neraca.
- 4.7 Investasi dalam saham yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan, atau harga pasar yang mana lebih rendah (Lower Cost or Market).

5) **ASET TETAP**

- 5.1 Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material.
- 5.2 Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.
- 5.3 Aset tetap antara lain terdiri dari :

- Tanah
- Jalan dan Jembatan
- Bangunan Air (irigasi)
- Instalasi
- Jaringan
- Bangunan Gedung
- Bangunan Monumen
- Alat-Alat Besar
- Alat Angkutan
- Alat Bengkel dan Alat Ukur
- Alat Pertanian
- Alat-Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga
- Alat Studio dan Alat Komunikasi
- Alat-Alat Kedokteran
- Alat-Alat Laboratorium
- Buku dan Perpustakaan
- Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan
- Hewan Ternak dan Tumbuhan
- Alat Keamanan

5.4 Penjelasan Akun Aset Tetap

- a. Tanah
Tanah meliputi tanah kantor, tanah sarana kesehatan, tanah sarana pendidikan, tanah rumah dinas, tanah sarana olahraga, tanah sarana sosial, tanah terminal, angkutan darat, tanah angkutan laut, tanah waduk, tanah saluran air, tanah jalan, tanah dermaga dan lain-lain sejenisnya.
- b. Jalan dan Jembatan
Jalan dan Jembatan meliputi jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain sejenisnya.
- c. Bangunan Air (Irigasi)
Bangunan Air meliputi waduk, pintu air, saluran air dan lain-lain sejenisnya.
- d. Instalasi
Instalasi meliputi instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air

- kotor, instalasi pengolahan bahan bangunan dan lain-lain sejenisnya.
- e. Jaringan
Jaringan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan lain-lain sejenisnya.
 - f. Bangunan Gedung
Bangunan Gedung meliputi gedung kantor, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung rumah dinas, gedung sarana olahraga, gedung sarana tempat ibadah, gedung sarana sosial dan lain-lain sejenisnya.
 - g. Bangunan Monumen
Bangunan Monumen meliputi bangunan bersejarah, bangunan tugu peringatan, bangunan tugu titik kontrol dan lain-lain sejenisnya.
 - h. Alat-alat Besar
Alat-alat Besar meliputi alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya.
 - i. Alat-alat Angkutan
Alat Angkutan meliputi alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tidak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tidak bermotor dan lain-lain sejenisnya.
 - j. Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur meliputi alat bengkel bermesin, alat bengkel tidak bermesin, alat ukur dan lain-lain sejenisnya.
 - k. Alat Pertanian
Alat Pertanian meliputi alat pengolahan, alat pemeliharaan/panen, penyimpanan dan lain-lain sejenisnya.
 - l. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat-alat kantor dan Rumah Tangga meliputi alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja kursi kerja dan lain-lain sejenisnya.
 - m. Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat Studio dan Alat Komunikasi meliputi alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar dan lain-lain sejenisnya.
 - n. Alat-alat Kedokteran
Alat-alat kedokteran meliputi alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran KB, alat kedokteran mata, alat kedokteran THT, alat rontgen, alat farmasi, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, alat kedokteran bagian penyakit dalam dan lain-lain sejenisnya.
 - o. Alat-alat Laboratorium
Alat-alat laboratorium meliputi unit-unit laboratorium, alat laboratorium mikrobiologi, alat laboratorium hidrokimia, alat laboratorium buatan dan lain-lain sejenisnya.
 - p. Buku dan Perpustakaan
Buku dan Perpustakaan meliputi buku, terbitan berkala, barang-barang perpustakaan dan lain-lain sejenisnya.
 - q. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan meliputi barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya dan lain-lain sejenisnya.
 - r. Hewan/Ternak dan Tumbuhan
Hewan/Ternak dan Tumbuhan meliputi hewan, tanaman dan lain-lain sejenisnya.

s. Alat Keamanan

Alat Keamanan meliputi alat keamanan dan lain-lain sejenisnya.

5.4.1 Pengakuan

- Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- Transaksi dan kejadian setelah perolehan aktiva tetap meliputi pemeliharaan (maintenance), perbaikan (repairs), penambahan (additions), pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Pemeliharaan (maintenance) adalah hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh kondisi kerja (operasi) yang baik dari sebuah aset tetap (misalnya pemeliharaan rutin, secara periodik) dan sifatnya rutin. Pemeliharaan ini tidak memperbaiki atau menambah umur ekonomis aktiva. Biaya pemeliharaan diakui langsung sebagai beban pada periode berjalan dan dicatat pada rekening Biaya Pemeliharaan.

Penambahan adalah peningkatan nilai aset karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan: (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan atau menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

Penggantian utama (replacements) adalah memperbaharui bagian utama aktiva tetap dan tidak bersifat rutin. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara pengurangan nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

5.4.2 Pengukuran

- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan.

Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

- Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.
- Bangunan air (irigasi) diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.
- Bangunan gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.
- Bangunan Monumen diukur berdasarkan revaluasi terhadap bangunan monumen bersangkutan.
- Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.
- Alat-alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat bengkel dan alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat pertanian diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat-alat angkutan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat kantor dan rumah tangga diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk

memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

- Alat studio dan alat komunikasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat-alat kedokteran diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat Laboratorium diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Barang Bercorak kesenian/kebudayaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Hewan/ ternak dan tumbuhan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Alat keamanan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

5.4.3 Penilaian

Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

5.4.4 Pengungkapan

- Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi) pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.
- Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan harga dasar yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.

6) DANA CADANGAN

- 6.1 Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- 6.2 Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.
- 6.3 Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Dana Cadangan antara lain klarifikasi Dana Cadangan berdasarkan tujuan pembentukan.

7) **ASET LAIN-LAIN**

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain terdiri dari :

7.1. **Tagihan Penjualan Angsuran** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dari tagihan penjualan angsuran lainnya.

7.2. **Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO) dan Penjelasannya**

Adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak tersebut membangun sarana beserta fasilitas diatas tanah tersebut, kemudian menyerahkan tanah, bangunan, atau sarana lain berikut fasilitas yang telah dibangunnya untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu dan akan diserahkan kembali kepada daerah setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati.

Pengakuan atas Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) Dan Kerjasama Operasi (KSO) berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut dibangun, Biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang paling obyektif atau berdaya uji.

7.3. **Konstruksi Dalam Pengerjaan** adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Bangunan dalam pekerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan bangunan dalam pekerjaan adalah tujuan peruntukan bangunan, unit penanggungjawab bangunan dan hal-hal lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Lain-Lain Aktiva adalah aktiva di luar tagihan penjualan angsuran, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

B. KEWAJIBAN

Tujuan kebijakan akuntansi utang adalah mengatur perlakuan akuntansi utang. Perlakuan akuntansi utang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan utang.

Kewajiban adalah utang kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek dan Kewajiban jangka panjang.

1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

a. Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

1) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo** merupakan sebagian dari utang pokok jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

2) **Utang Biaya Pinjaman** merupakan utang yang terjadi sebagai ikutan utang pokok, yang berupa bunga, denda dan *commitmen fee/Commitmen Charge*. Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah

kepada Lender karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak. *Comitment Fee* adalah utang yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar prosentase tertentu karena tidak ditariknya pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

- 3) **Utang Jangka Pendek Lainnya** adalah utang jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan pada perkiraan tersebut diatas.
- b. Kewajiban jangka pendek dilakukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversi ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi.
- c. Kewajiban jangka pendek dicatat pada saat timbulnya utang tersebut yaitu jika sudah ada ketetapannya.

2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu priode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- a. **Utang Jangka Panjang** merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka panjang dapat berasal dari pinjaman dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang (pinjaman) jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aktiva Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- b. **Utang Bunga** merupakan utang kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari 1 (satu) satu periode akuntansi. Utang jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
- c. **Utang Belanja** merupakan utang yang berasal dari belanja yang sudah di bebaskan tetapi belum dilakukan pembayaran sehingga masih merupakan kewajiban.
- d. **Utang Pajak** merupakan utang yang berasal dari pajak yang belum dibayar. Utang Pajak timbul karena sampai dengan akhir tahun pajak yang telah dipungut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah namun belum disetorkan ke KPKN.
- e. **Pendapatan Diterima di Muka** merupakan utang pihak ketiga yang berasal dari setoran kelebihan pembayaran uang muka. Rekening Pendapatan Diterima di Muka muncul karena sampai dengan akhir tahun ada jenis pendapatan yang belum direalisasi sampai namun telah dilakukan penerimaan kas, sehingga pada akhir periode akuntansi perlu dicatat berapa jumlah yang belum direalisasi menjadi pendapatan
- f. **Utang Lain-lain** merupakan utang lancar yang tidak dapat diklasifikasikan pada jenis-jenis rekening utang.

C. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

IV.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik tersebut adalah :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan dan
4. Dapat dipahami

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca Daerah ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan Biro Protokol Dan Komunikasi Publik kepada para pemakai/stakeholders.

Biro Protokol dan Komunikasi Publik

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

V.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Bertitik tolak pada arti dan ruang lingkup keuangan daerah, maka dikemukakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya sesuai struktur APBD Biro Protokol dan Komunikasi Publik berikut disajikan uraian tentang realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, Ekuitas sebagai berikut:

V.1.1. PENDAPATAN-LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA:

Realisasi penerimaan retribusi sampai Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 0,00,- atau 0%. Hal ini dikarenakan tidak adanya pendapatan yang dianggarkan pada Biro Protokol dan Komunikasi Publik pada Tahun 2018.

V.1.2. BELANJA

Realisasi belanja Biro Protokol dan Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp9.026.813.512,00 atau sekitar 96,33% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp9.371.000.000,00. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017, belanja Tahun Anggaran 2018 lebih tinggi Rp1.000.640.067,00 atau sekitar 12,49%. Realisasi belanja Biro Protokol dan Komunikasi Publik sebesar Rp9.026.813.512,00 dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu belanja operasi sebesar Rp8.767.388.512,00 dan belanja modal sebesar Rp259.425.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018		Anggaran/ Total Anggaran %	Realisasi/ Total Anggaran %	Tahun Anggaran 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)					
	Belanja Operasi	9.095.477.100,00	8.767.388.512,00	97,06	93,56	8.026.173.445,00	741.215.067,00	9,23
1.	Belanja Pegawai	545.328.000,00	515.378.000,00	5,82	5,50	482.306.000,00	33.072.000,00	6,86
2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.149.100,00	8.252.010.512,00	91,24	88,06	7.543.867.445,00	708.143.067,00	9,39
	Belanja Modal	275.522.900,00	259.425.000,00	2,94	2,77	-	259.425.000,00	#DIV/0!
1	Belanja Modal	275.522.900,00	259.425.000,00	2,94	2,77	-	259.425.000,00	#DIV/0!
	Jumlah	9.371.000.000,00	9.286.238.512,00	100,00	99,10	8.026.173.445,00	1.260.065.067,00	15,70

a. Belanja Pegawai Rp515.378.000,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp545.328.000,00 atau 5,82% dari total anggaran Biro Protokol dan Komunikasi Publik. Sedangkan Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp515.378.000,00 atau 94,51% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp29.950.000,00 atau 5,49%. Sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp482.306.000,00. Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.
Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2018
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Realisasi TA 2017
	Anggaran 2018	Realisasi TA 2018	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai					
Belanja Honorarium PNS	177.000.000,00	158.100.000,00	(18.900.000,00)	89,32	147.350.000,00
Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.400.000,00	55.400.000,00	(4.000.000,00)	93,27	51.950.000,00
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	24.000.000,00	9.600.000,00	(14.400.000,00)	40,00	9.600.000,00
Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Barang	93.600.000,00	93.100.000,00	(500.000,00)	99,47	85.800.000,00
Belanja Honorarium Non-PNS	368.328.000,00	357.278.000,00	(11.050.000,00)	97,00	334.956.000,00
Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	368.328.000,00	357.278.000,00	(11.050.000,00)	97,00	334.956.000,00
Jumlah	545.328.000,00	515.378.000,00	(29.950.000,00)	94,51	482.306.000,00

1. Belanja Honorarium PNS Rp158.100.00,00
 Belanja Honorarium PNS dianggarkan sebesar Rp177.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp158.100.000,00 atau 89,32%. Sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp147.350.000,00. Rincian obyek belanja Honorarium PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1. Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp55.400.000.00
 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dianggarkan Rp59.400.000,00 dan realisasi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp55.400.000.00 atau 89,32%.

1.2. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp 9.600.000.00
 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dianggarkan Rp24.000.000,00 dan realisasi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp9.600.000,00 atau 40,00 %.

1.3. Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Barang Rp 93.100.000,00
 Honorarium Pengelola Uang dan Barang dianggarkan Rp93.600.000,00 dan realisasi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp93.100.000,00 atau 99,47%.

2. Belanja Honorarium Non PNS Rp357.278.000,00
 Belanja Honorarium Non PNS dianggarkan sebesar Rp368.328.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp357.278.000,00 atau 97,00%. Sedangkan realisasi tahun 2017 adalah Rp334.956.000,00. Rincian obyek belanja honorarium non PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	368.328.000,00	357.278.000,00	97,00	334.956.000,00	93,75
Jumlah	368.328.000,00	357.278.000,00	97,00	334.956.000,00	93,75

b. Belanja Barang dan Jasa Rp7.543.867.445,00

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp7.829.344.000,00 atau 94% dari total anggaran Biro Protokol dan Komunikasi Publik. Realisasi Sampai dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.543.867.445,00 atau 96,35% sehingga terdapat sisa anggaran Rp282.476.555,00 atau 3,74%. Sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp9.176.550.007,00. Secara rinci realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2018
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Realisasi Tahun 2017
	Anggaran 2018	Realisasi Semester Pertama 2018	(Rp)	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
Belanja Operasi					
Belanja Barang dan Jasa					
Belanja Bahan Pakai Habis	640.761.650,00	619.214.800,00	(21.546.850,00)	96,64	233.402.850,00
Belanja Jasa Kantor	5.242.039.600,00	5.073.367.468,00	(168.672.132,00)	96,78	5.096.543.515,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	632.762.240,00	573.738.050,00	(59.024.190,00)	90,67	256.525.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	-		#DIV/0!	-
Belanja Makanan dan Minuman	32.112.550,00	31.500.000,00	(612.550,00)	98,09	12.000.000,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu	58.250.000,00	56.000.000,00	(2.250.000,00)	96,14	15.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.944.223.060,00	1.898.190.194,00	(46.032.866,00)	97,63	1.929.996.080,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	-		-	#DIV/0!	-
Jumlah	8.550.149.100,00	8.252.010.512,00	(298.138.588,00)	96,51	7.543.867.445,00

1. Belanja Bahan Pakai Habis Rp619.214.800,00

Belanja Bahan Pakai Habis dianggarkan sebesar Rp640.761.650,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp619.214.800,00 atau 96,64%. Sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp883.183.690,00. Rincian obyek belanja pakai habis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Alat Tulis Kantor	81.461.650,00	76.013.300,00	93,31	48.975.350,00	35,57
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	5.760.000,00	96,00	5.775.000,00	(0,26)
Belanja Dokumentasi	28.000.000,00	27.990.250,00	99,97	30.000.000,00	(7,18)
Belanja Baliho	525.300.000,00	509.451.250,00	96,98	148.652.500,00	70,82
Jumlah	640.761.650,00	619.214.800,00	96,64	233.402.850,00	62,31

2. Belanja Jasa Kantor Rp5.073.367.468,00

Belanja Jasa Kantor dianggarkan sebesar Rp5.242.039.600,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.073.367.468,00 atau 96,78%. Sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp 4.446.762.675,00. Rincian obyek belanja jasa kantor dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Surat Kabar/Majalah	302.945.600,00	292.107.600,00	96,42	623.715.000,00	(113,52)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet	20.000.000,00	16.165.840,00	80,83	17.965.840,00	(11,13)
Belanja Paket/Pengiriman	31.344.000,00	8.100.000,00	25,84	8.100.000,00	0,00
Belanja Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	14.890.000,00	99,27	14.975.000,00	0,00
Belanja Jasa Iklan	270.000.000,00	261.800.000,00	96,96	36.000.000,00	86,25
Belanja Jasa Penyiaran Melalui Media Massa	505.000.000,00	504.575.000,00	99,92	405.587.675,00	19,62
Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.097.750.000,00	3.975.729.028,00	97,02	3.990.200.000,00	0,00
Jumlah	5.242.039.600,00	5.073.367.468,00	96,78	5.096.543.515,00	(0,46)

3. Belanja Cetak dan Penggandaan **Rp573.738.050,00**

Belanja Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp632.762.240,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp573.738.050,00 atau 90,67%. Sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp256.525.000,00. Rincian obyek belanja cetak dan penggandaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017	Naik/Turun (%)
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Cetak	597.962.240,00	539.689.000,00	90,25	222.125.000,00	58,84
Belanja Penggandaan	34.000.000,00	33.249.050,00	97,79	34.400.000,00	(3,46)
Belanja Penjilidan	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00	100,00
Jumlah	632.762.240,00	573.738.050,00	90,67	256.525.000,00	55,29

4. Belanja Makanan dan Minuman **Rp31.500.000,00**

Belanja Makanan dan Minuman dianggarkan sebesar Rp32.112.550,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp31.500.000,00 atau 98,09%. Sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp12.000.000,00. Rincian obyek belanja makanan dan minuman dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.112.550,00	31.500.000,00	98,09	12.000.000,00	61,90
Jumlah	32.112.550,00	31.500.000,00	98,09	12.000.000,00	61,90

5. Belanja Pakaian Khusus dan Hari – Hari Tertentu - **Rp56.000.000,00**

Belanja Pakaian Khusus dan Hari – Hari Tertentu dianggarkan sebesar Rp58.250.000,00 dan Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp56.000.000,00 atau 0,00%. Sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp15.400.000,00. Rincian obyek belanja pakaian khusus dan hari – hari tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Pakaian Batik Tradisional	58.250.000,00	56.000.000,00	96,14	15.400.000,00	72,50
Jumlah	58.250.000,00	56.000.000,00	96,14	15.400.000,00	-

6. Belanja Perjalanan Dinas Rp1.898.190.194,00

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp1.944.223.060,00 dan Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.898.190.194,00 atau 97,63%. Sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp 1.929.996.080,00. Rincian obyek belanja perjalanan dinas dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.604.223.060,00	1.597.648.203,00	99,59		100,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	340.000.000,00	300.541.991,00	88,39		100,00
Jumlah	1.944.223.060,00	1.898.190.194,00	97,63	-	100,00

c. Belanja Modal Rp259.425.000,00

Belanja Modal dianggarkan pada tahun 2018 sebesar Rp275.522.900 dan Realisasi tahun 2018 Sebesar Rp259.425.000,00. Sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp 0,00. Secara rinci realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.5.
Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Realisasi 2017
	Anggaran 2018	Realisasi 2018	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
Belanja Modal Tanah					
Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Gedung Bangunan	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	-	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	-	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	51.887.450,00	49.500.000,00	(2.387.450,00)	95,40	-
Belanja Modal Pengadaan Komputer	113.113.750,00	105.125.000,00	(7.988.750,00)	92,94	-
Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	83.634.250,00	79.800.000,00	(3.834.250,00)	95,42	-
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	26.887.450,00	25.000.000,00	(1.887.450,00)	92,98	-
Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	-	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan					
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	-	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					
Belanja Modal Pengadaan Buku	-	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	-	#DIV/0!	-
Jumlah	275.522.900,00	259.425.000,00	(16.097.900,00)	94,16	-

V.1.3. PENDAPATAN-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Tidak ada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) Biro pada Biro Protokol dan Komunikasi Publik.

V.1.4. BEBAN

Beban Biro Protokol dan Komunikasi Publik tahun anggaran 2018 sebesar Rp9.062.745.561,00 atau naik sebesar 6,42% dari beban tahun 2017 sebesar Rp8.480.620.579,67. Beban dikelompokkan menjadi empat yaitu beban operasi, beban transfer, defisit non operasional, dan beban luar biasa.

Tabel 5.7
Rincian Beban TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Tahun 2018	Saldo Tahun 2017	Kenaihan/ (Penurunan)	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN OPERASI	9.062.745.561,00	8.480.620.579,67	582.124.981,33	6,42
Beban Pegawai - LO	515.378.000,00	482.306.000,00	33.072.000,00	6,42
Beban Barang dan Jasa	8.253.010.512,00	7.543.867.445,00	709.143.067,00	8,59
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	294.357.049,00	454.447.134,67	(160.090.085,67)	(54,39)
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
Beban Lain - Lain	-	-	-	-
BEBAN TRANSFER	-	-	-	-
beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	-	-	-	-
DEFISIT NON OPERASIONAL	-	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	-
BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-	-
Jumlah Beban	9.062.745.561,00	8.480.620.579,67	582.124.981,33	6,42

a. Beban Operasi Rp9.062.745.561,00

Beban Operasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp9.062.745.561,00 atau naik sebesar 6,42% dari beban operasi tahun 2017 senilai Rp8.480.620.579,67. Beban Operasi terdiri atas Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan Amortisasi. Rincian beban operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7.
Rincian Beban Operasi TA 2018

(dalam rupiah)			
Uraian	Saldo Tahun 2018	Saldo Tahun 2017	Kenaikan/ (Penurunan)
1	2	3	4
Beban Pegawai	515.378.000,00	482.306.000,00	33.072.000,00
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	55.400.000,00	51.950.000,00	3.450.000,00
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
Beban Honorarium Pengelola Uang dan Barang - LO	93.100.000,00	85.800.000,00	7.300.000,00
Beban Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap - LO	357.278.000,00	334.956.000,00	22.322.000,00
Beban Barang dan Jasa	8.253.010.512,00	7.543.867.445,00	780.727.860,00
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	76.013.300,00	48.975.350,00	27.037.950,00
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	5.760.000,00	5.775.000,00	(15.000,00)
Beban Dokumentasi	28.990.250,00	30.000.000,00	(1.009.750,00)
Beban Baliho	509.451.250,00	148.652.500,00	360.798.750,00
Beban Bahan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	292.107.600,00	623.715.000,00	(331.607.400,00)
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	16.165.840,00	17.965.840,00	(1.800.000,00)
Beban Jasa Paket/Pengiriman	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
Beban Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	14.890.000,00	14.975.000,00	(85.000,00)
Beban Jasa Iklan	261.800.000,00	36.000.000,00	225.800.000,00
Beban Jasa Penyiaran Melalui Media Massa	504.575.000,00	405.587.675,00	98.987.325,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	3.975.729.028,00	3.990.200.000,00	(14.470.972,00)
Beban Cetak	539.689.000,00	222.125.000,00	317.564.000,00
Beban Penggandaan	33.249.050,00	34.400.000,00	(1.150.950,00)
Beban Penjilidan	800.000,00	0,00	800.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	31.500.000,00	12.000.000,00	19.500.000,00
Beban Pakaian Kerja Lapangan	0,00	0,00	0,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	56.000.000,00	15.400.000,00	40.600.000,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.597.648.203,00	1.557.869.296,00	39.778.907,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.541.991,00	372.126.784,00	(71.584.793,00)
Beban Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	0,00	0,00	0,00
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	0,00	0,00	0,00
Beban Honorarium Pengelola Uang dan Barang - LO	0,00	0,00	0,00
Beban Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap - LO	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	294.357.049,00	236.468.887,33	57.888.161,67
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	101.571.616,00	68.283.046,00	33.288.570,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	5.014.291,00	8.631.772,00	(3.617.481,00)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	13.585.896,00	16.942.761,00	(3.356.865,00)
Beban Penyusutan Komputer	82.663.079,00	65.038.892,00	17.624.187,00
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)
Beban Penyusutan Alat Studio	41.174.167,00	46.463.083,00	(5.288.916,00)
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	40.373.000,00	19.841.500,00	20.531.500,00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	9.975.000,00	4.987.500,00	4.987.500,00
Beban Penyusutan Barang Tidak Diketahui Keberadaannya	0,00	5.180.333,33	(5.180.333,33)
Beban Lain - Lain	0,00	0,00	0,00
Beban Lain - Lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban	9.062.745.561,00	8.262.642.332,33	871.688.021,67

1. **Beban Pegawai Rp515.378.000,00**

Beban Pegawai TA 2018 sebesar Rp515.378.000,00 sedangkan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp515.378.000,00. Beban Pegawai TA 2017 sebesar Rp482.306.000,00. Rincian beban pegawai sebagai berikut:

Tabel 5.8.
Rincian Beban Pegawai TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2018		Selisih	Saldo Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
1	2	3	4	5
Beban Pegawai				
Honorarium PNS	158.100.000,00	158.100.000,00	-	147.350.000,00
Honorarium Non PNS	357.278.000,00	357.278.000,00	-	334.956.000,00
Jumlah	515.378.000,00	515.378.000,00	0,00	482.306.000,00

a. **Beban Honorarium PNS Rp158.100.000,00**

Beban Honorarium PNS TA 2018 sebesar Rp158.100.000,00 realisasi Belanja Honorarium PNS sebesar Rp158.100.000,00. Beban Honorarium PNS TA 2017 sebesar Rp147.350.000,00. Rincian obyek beban honorarium PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2018		Selisih	Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.400.000,00	55.400.000,00	-	51.950.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	-	9.600.000,00
Honorarium Pengelola Uang dan Barang	93.100.000,00	93.100.000,00	-	85.800.000,00
Jumlah	158.100.000,00	158.100.000,00	-	147.350.000,00

b. **Beban Honorarium Non PNS Rp357.278.000,00**

Beban Honorarium Non PNS TA 2018 sebesar Rp357.278.000,00, sama dengan realisasi Belanja Honorarium Non PNS sebesar Rp357.278.000,00. Beban Honorarium Non PNS TA 2017 sebesar Rp334.956.000,00. Rincian obyek beban honorarium non PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018		Selisih	Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	357.278.000,00	357.278.000,00	-	334.956.000,00
Jumlah	357.278.000,00	139.565.000,00	-	334.956.000,00

2. **Beban Barang dan Jasa Rp8.253.010.512,00**

Beban Barang dan Jasa TA 2018 sebesar Rp8.253.010.512,00 sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp8.252.010.512,00. Selisih antara beban barang dan jasa dengan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.000.000,00. Beban Barang dan Jasa TA 2017 sebesar Rp7.543.867.445,00. Rincian beban barang dan jasa sebagai berikut:

Tabel 5.9.

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2018		Selisih	Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Beban Barang dan Jasa				
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	76.013.300,00	76.013.300,00	0,00	48.975.350,00
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	5.775.000,00
Beban Dokumentasi	28.990.250,00	27.990.250,00	1.000.000,00	30.000.000,00
Beban Baliho	509.451.250,00	509.451.250,00	0,00	148.652.500,00
Beban Bahan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	292.107.600,00	292.107.600,00	0,00	623.715.000,00
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	16.165.840,00	16.165.840,00	0,00	17.965.840,00
Beban Jasa Paket/Pengiriman	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
Beban Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	14.890.000,00	14.890.000,00	0,00	14.975.000,00
Beban Jasa Iklan	261.800.000,00	261.800.000,00	0,00	36.000.000,00
Beban Jasa Penyiaran Melalui Media Massa	504.575.000,00	504.575.000,00	0,00	405.587.675,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	3.975.729.028,00	3.975.729.028,00	0,00	3.990.200.000,00
Beban Cetak	539.689.000,00	539.689.000,00	0,00	222.125.000,00
Beban Penggandaan	33.249.050,00	33.249.050,00	0,00	34.400.000,00
Beban Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	12.000.000,00
Beban Pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	15.400.000,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.597.648.203,00	1.597.648.203,00	0,00	1.557.869.296,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.541.991,00	300.541.991,00	0,00	372.126.784,00
Beban Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Honorarium Pengelola Uang dan Barang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	8.253.010.512,00	8.252.010.512,00	1.000.000,00	7.543.867.445,00

- a. **Beban Bahan Pakai Habis Rp620.214.800,00**
- Beban Bahan Pakai Habis TA 2018 sebesar Rp620.214.800,00 sedangkan realisasi Belanja Pakai Habis sebesar Rp619.214.800,00, selisih sebesar Rp1.000.000,00. Selisih tersebut karena ada pengalihan pembebanan dari belanja modal ke belanja dokumentasi. Beban Bahan Pakai Habis TA 2017 sebesar Rp233.402.850,00. Rincian mutasi beban bahan pakai habis sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2018				Tahun 2017
	Belanja a	Penambahan b	Pengurangan c	Beban e	
Alat Tulis Kantor	76.013.300,00	0,00	-	76.013.300,00	48.975.350,00
Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	5.760.000,00	0,00	-	5.760.000,00	5.775.000,00
Dokumentasi	27.990.250,00	1.000.000,00	-	28.990.250,00	30.000.000,00
Baliho	509.451.250,00	0,00	-	509.451.250,00	148.652.500,00
Jumlah	619.214.800,00	1.000.000,00	-	620.214.800,00	233.402.850,00

b. Beban Jasa Kantor Rp5.073.367.468,00

Beban Jasa Kantor TA 2018 sebesar Rp5.073.367.468,00 sedangkan realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp5.073.367.468,00. Beban Jasa Kantor TA 2017 sebesar Rp5.096.543.515,00. Rincian obyek beban jasa kantor dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2018		Selisih	Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Jasa surat kabar/ Majalah	292.107.600,00	292.107.600,00	-	623.715.000,00
Jasa Kawat/Faksimili/Internet	16.165.840,00	16.165.840,00	-	17.965.840,00
Jasa Paket/Pengiriman	8.100.000,00	8.100.000,00	-	8.100.000,00
Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	14.890.000,00	14.890.000,00	-	14.975.000,00
Jasa Iklan	261.800.000,00	261.800.000,00	-	36.000.000,00
Jasa Penyiaran Melalui Media Massa	504.575.000,00	504.575.000,00	-	405.587.675,00
Jasa Pihak Ketiga	3.975.729.028,00	3.975.729.028,00	-	3.990.200.000,00
Jumlah	5.073.367.468,00	5.073.367.468,00	-	5.096.543.515,00

c. Beban Cetak dan Penggandaan Rp573.738.050,00

Beban Cetak dan Penggandaan TA 2018 sebesar Rp573.738.050,00 sedangkan realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan Rp573.738.050,00. Beban Cetak dan Penggandaan TA 2017 sebesar Rp256.525.000,00. Rincian obyek beban cetak dan penggandaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2018		Selisih	Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Cetak	539.689.000,00	539.689.000,00	-	222.125.000,00
Penggandaan	33.249.050,00	33.249.050,00	-	34.400.000,00
Penjilidan	800.000,00	800.000,00	-	-
Jumlah	573.738.050,00	573.738.050,00	-	256.525.000,00

d. Beban Makanan dan Minuman Rp31.500.000,00

Beban Makanan dan Minuman TA 2018 sebesar Rp31.500.000,00 sedangkan realisasi Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp31.500.000,00. Beban Makanan dan Minuman TA 2017 sebesar Rp12.000.000,00. Rincian obyek beban makanan dan minuman dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2018		Selisih	Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Makanan dan Minuman Rapat	31.500.000,00	31.500.000,00	-	12.000.000,00
Jumlah	31.500.000,00	31.500.000,00	-	12.000.000,00

e. Beban Pakaian Khusus dan Hari – Hari Tertentu Rp56.000.000,00

Realisasi Beban Pakaian Khusus dan Hari – Hari Tertentu TA 2018 sebesar Rp56.000.000,00 sedangkan Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu TA 2017 sebesar Rp15.400.000,00. Rincian obyek beban pakaian khusus dan hari – hari tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2018		Selisih	Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Pakaian Batik Tradisional	56.000.000,00	56.000.000,00	-	15.400.000,00
Jumlah	56.000.000,00	56.000.000,00	-	15.400.000,00

f. Beban Perjalanan Dinas Rp1.898.190.194,00

Beban Perjalanan Dinas TA 2018 sebesar Rp1.898.190.194,00 sedangkan realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp1.898.190.194,00. Beban Perjalanan Dinas TA 2017 sebesar Rp1.929.996.080,00. Rincian obyek beban perjalanan dinas dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2018		Selisih	Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.597.648.203,00	1.597.648.203,00	-	1.557.869.296,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.541.991,00	300.541.991,00	-	372.126.784,00
Jumlah	1.898.190.194,00	1.898.190.194,00	-	1.929.996.080,00

3. Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp294.357.049,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2018 sebesar 294.357.049,00 sedangkan TA 2017 sebesar Rp294.357.049,00. Rincian obyek beban penyusutan dan amortisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2018		Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja	
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	101.571.616,00		68.283.046,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	5.014.291,00		8.631.772,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	13.585.896,00		17.961.887,00
Beban Penyusutan Komputer	82.663.079,00		60.667.685,00
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00		1.100.000,00
Beban Penyusutan Alat Studio	41.174.167,00		48.088.875,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	40.373.000,00		14.642.500,00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	9.975.000,00		4.987.500,00
Jumlah	294.357.049,00	-	224.363.265,00

V.1.5. ASET

Aset terdiri atas :

1. ASET LANCAR

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari:

a) Kas Bendahara Penerimaan

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

b) Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,00, dengan rincian saldo kas tunai Rp0,00 dan saldo kas bank Rp0,00. Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00, dengan rincian saldo kas tunai Rp0,00 dan saldo kas bank Rp0,00.

c) Piutang Lain-lain

Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 0.00

d) Persediaan

Saldo persediaan barang pakai habis per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2017 juga sebesar Rp0,00. Rincian persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2018
1.	Persediaan Alat Tulis Kantor	-	76.013.300,00	76.013.300,00	-
2.	Persediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	-	5.760.000,00	5.760.000,00	-
3	Persediaan Cetak	-	539.689.000,00	539.689.000,00	-
4	Persediaan Makanan & Minuman Rapat	-	31.500.000,00	31.500.000,00	-
Jumlah		-	652.962.300,00	652.962.300,00	-

2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan salah satu instrumen untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek (3 – 12 bulan) dan investasi jangka panjang (lebih dari 12 bulan).

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo investasi jangka panjang non permanen per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 Rp0,00.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Saldo investasi jangka panjang permanen per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 Rp0,00.

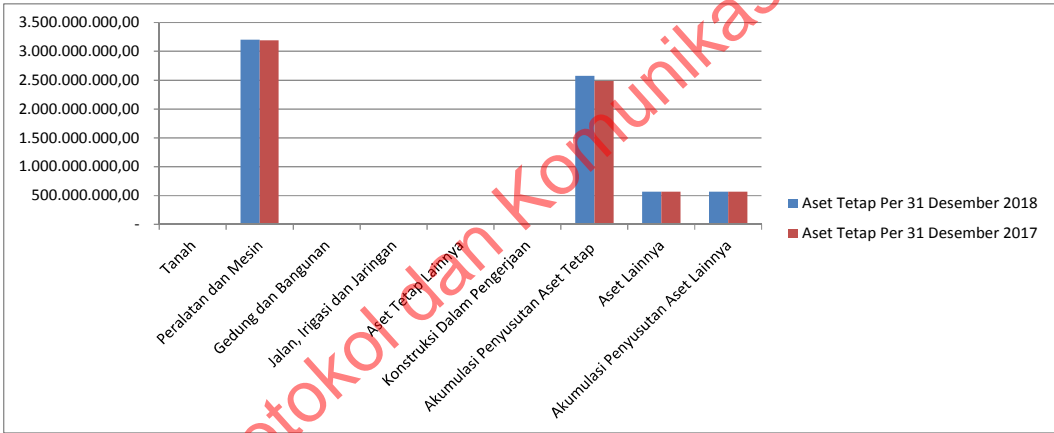
3. ASET TETAP Rp3.187.941.171,0

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp626.775.594,00. Sedangkan saldo aset tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp701.688.178,00. Perbandingan rincian aset tetap, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.10.
Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	3.187.941.171,00	259.425.000,00	244.701.251,00	3.202.664.920,00
Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	2.486.252.993,00	294.357.049,00	204.720.716,00	2.575.889.326,00
Jumlah Aset Tetap	701.688.178,00	553.782.049,00	449.421.967,00	626.775.594,00
Aset Lainnya	567.406.560,00	-	-	567.406.560,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	567.406.560,00	-	-	567.406.560,00
Jumlah Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	701.688.178,00	553.782.049,00	449.421.967,00	626.775.594,00



a) Tanah Rp0,00

Tidak belanja modal untuk tanah karena Biro Protokol dan Komunikasi Publik tidak memiliki aset tanah.

b) Peralatan dan mesin Rp3.202.664.920,00

Peralatan dan Mesin yang dimiliki Biro Protokol dan Komunikasi Publik per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.202.664.920,00, sedangkan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.187.941.171,00. Mutasi peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2018
Saldo Awal Per 01 Januari 2018 (a)	Rp 3.187.941.171,00
Penambahan:	
- Pembelian	Rp 259.425.000,00
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp -
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp 259.425.000,00
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp 243.701.251,00
- Reklasifikasi Keluar	Rp -
- Pengalihan (keluar)	Rp 1.000.000,00
- Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah (c)	Rp 244.701.251,00
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp 14.723.749,00
Saldo Per 31 Desember 2018 (a+(b-c))	Rp 3.202.664.920,00

Rincian saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

NAMA BARANG INVENTARIS	SALDO	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2018 (Rp)
	1 JANUARI 2018 (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
Alat-alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat-alat Angkutan	1.170.397.171,00	0,00	243.701.251,00	926.695.920,00
Alat Bengkel/Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.116.124.000,00	154.625.000,00	0,00	1.270.749.000,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	901.420.000,00	104.800.000,00	1.000.000,00	1.005.220.000,00
Alat-alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN	3.187.941.171,00	259.425.000,00	244.701.251,00	3.202.664.920,00

c) Gedung dan Bangunan Rp0,00

Tidak ada aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Biro Protokol dan Komunikasi Publik.

d) Jalan Irigasi dan Jaringan Rp0,00

Tidak ada aset Jalan Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Biro Protokol dan Komunikasi Publik.

e) Aset Tetap Lainnya Rp0,00

Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Biro Protokol dan Komunikasi Publik per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00. Mutasi aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,00

Tidak ada aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Biro Protokol dan Komunikasi Publik

g) Akumulasi Penyusutan Rp2.575.889.326,00

Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Biro Protokol dan Komunikasi Publik per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.575.889.326,00, sedangkan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.486.252.993,00.

JENIS PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 1 JANUARI 2018 (Rp)	PENYUSUTAN		PENYESUAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET PER 31 DESEMBER 2018 (Rp)
		SEMESTER I (Rp)	SEMESTER II (Rp)		
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Angkutan	(805.033.954,00)	(50.875.814,00)	(50.695.802,00)	204.720.716,00	(701.884.854,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel/Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Kantor & Rumah Tangga	(962.828.253,00)	(46.800.863,00)	(54.462.403,00)	0,00	(1.064.091.519,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio & Alat Komunikasi	(718.390.786,00)	(42.832.750,00)	(48.689.417,00)	0,00	(809.912.953,00)
Alat-alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN	(2.486.252.993,00)	(140.509.427,00)	(153.847.622,00)	204.720.716,00	(2.575.889.326,00)

h) Aset Lainnya Rp 0,00

Aset Lainnya yang dimiliki Biro Protokol dan Komunikasi Publik per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00. Mutasi aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2018
Saldo Awal Per 01 Januari 2018 (a)	Rp -
Penambahan:	
Jumlah (b)	Rp -
Pengurangan:	
Akumulasi Penyusutan Tahun 2018	Rp -
Jumlah (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo Per 31 Desember 2018 (a+(b-c))	Rp -

V.1.6. KEWAJIBAN

Kewajiban terdiri atas :

1. Kewajiban Jangka Pendek

a) Utang Penghitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo utang penghitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 Rp0,00.

b) Utang Bunga

Saldo utang bunga per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 Rp0,00.

c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 Rp0,00.

d) Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 Rp0,00.

e) Utang Beban

Saldo utang beban per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 0,00 dan per 31 Desember 2017 Rp0,00.

f) Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 0,00 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

g) Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Saldo kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.026.813.512,00 dan per 31 Desember 2017 Rp8.026.173.445,00.

2. Kewajiban Jangka Panjang

a) Utang Dalam Negeri

Saldo utang dalam negeri per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah Rp0,00.

b) Utang Jangka Panjang Lainnya

Saldo utang jangka panjang lainnya per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2017 Rp0,00.

V.1.7. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Biro Protokol dan Komunikasi Publik yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Ekuitas akhir Biro Protokol dan Komunikasi Publik per 31 Desember 2018 sebesar Rp 626.775.594,00. Sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp701.688.178,00. Perubahan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2018
Ekuitas Awal	Rp 701.688.178,00
Surplus/Defisit-LO	Rp (9.062.745.561,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp -
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp -
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp (38.980.535,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	Rp 9.026.813.512,00
Saldo Per 31 Desember 2018	Rp 626.775.594,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VI.1 Pengungkapan penting lainnya

Tidak ada kejadian luar biasa yang signifikan baik bencana alam maupun sosial yang di luar kemampuan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

VI.2 Temuan dan tindak lanjut temuan BPK

Tidak ada temuan dari BPK.

VI.3 Rekening pemerintah

Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki rekening BANK untuk penarikan anggaran/kas dilakukan secara tunai melalui Bendahara Pengeluaran.

Biro Protokol dan Komunikasi Publik

BAB VII

PENUTUP

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini mengacu pada Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU) dengan basis/dasar akrual. Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 11 Februari 2019

KEPALA BIRO PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,

HM. ISTANI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630704 198803 1 015

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) output Aplikasi SIMDA Keuangan
2. Neraca output Aplikasi SIMDA Keuangan
3. Laporan Operasional output Aplikasi SIMDA Keuangan
4. Laporan Perubahan Ekuitas output Aplikasi SIMDA Keuangan
5. Rekonsiliasi Keuangan
6. Rekonsiliasi Persediaan
7. Rekonsiliasi Aset
8. Bukti STS UP Per 31 Desember 2018
9. SPJ FS Per 31 Desember 2018
10. Rekap SP2D (UP/GU/TU/LS/Nihil)
11. BAP Kas Per 31 Desember 2018
12. BAP Stock Opname per Per 31 Desember 2018
13. Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, E, F)
14. Daftar Aset Lainnya
15. Daftar Aset Extra Comptable
16. Daftar Akumulasi Penyusutan

Biro Protokol dan Komunikasi Publik